



Laporan Keuangan

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

BALAI KIPM SURABAYA I

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023



BALAI KIPM SURABAYA I

Jl. Raya Bandara Juanda No. 23

Semabung, Gedangan, Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Balai Karantina Ikan,**

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I.

Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, 03 Mei 2024

Kepala,



Suprayogi, S.Pi., M.P.

NIP. 197007071995031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan Atas Pos - Pos Neraca	37
D. Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Operasional	59
E. Penjelasan Atas Perubahan Laporan Perubahan Ekuitas	70
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	76
VI. Lampiran dan Daftar	



**Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I**

Jl. Raya Bandara Ir. H. Juanda Nomor 23, Sidoarjo, 031-8688099

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan **Tahun Anggaran 2023** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo, 03 Mei 2024

Kepala,



Suprayogi, S.Pi., M.P.

NIP. 197007071995031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai KIPM Surabaya I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 7.482.299.212 atau mencapai 100,59 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 7.438.121.000

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 19.864.529.209 atau mencapai 99,57 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 19.951.217.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 33.465.095.886 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 274.460.023; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp. 0 ; Aset Tetap (netto) sebesar Rp. 33.190.635.863 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 38.166.966 dan Rp. 33.426.928.920.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.463.700.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 20.388.890.489 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (12.925.190.489). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 14.873.212 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (12.910.317.277).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 33.846.657.845 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (12.910.317.277) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 12.490.588.352 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 33.426.928.920.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KIPM SURABAYA I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	7.438.121.000	7.482.299.212	100,59	7.156.351.923
JUMLAH PENDAPATAN		7.438.121.000	7.482.299.212	100,59	7.156.351.923
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	12.429.331.000	12.349.051.083	99,35	12.531.426.574
Belanja Barang	B.4	6.868.496.000	6.862.402.126	99,91	6.712.267.586
Belanja Modal	B.5	653.390.000	653.076.000	99,95	60.450.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	B.2	19.951.217.000	19.864.529.209	99,57	19.304.144.160

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI KIPM SURABAYA I
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	2023	2022
ASET				
ASET LANCAR				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
	Piutang Bukan Pajak	C.4	736.314	-
	Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(3.682)	-
	Belanja Dibayar di Muka	C.8	22.875.000	18.750.000
	Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
	Persediaan	C.10	250.852.391	263.037.646
	Jumlah Aset Lancar		274.460.023	281.787.646
PIUTANG JANGKA PANJANG				
	Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
	Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP				
	Tanah	C.14	23.356.710.000	23.356.710.000
	Peralatan dan Mesin	C.15	13.920.548.236	13.509.354.396
	Gedung dan Bangunan	C.16	9.686.349.336	9.686.349.336
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	224.579.100	224.579.100
	Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-

			83.490.000	-
	Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(14.081.040.809)	(13.170.629.658)
	Jumlah Aset Tetap		33.190.635.863	33.606.363.174
ASET LAINNYA				
	Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
	Aset Lain-Lain	C.22	-	-
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
	Jumlah Aset Lainnya		-	-
	JUMLAH ASET		33.465.095.886	33.888.150.820
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	38.166.966	41.492.975
	Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
	Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		38.166.966	41.492.975
	JUMLAH KEWAJIBAN		38.166.966	41.492.975
EKUITAS				
	Ekuitas	C.28	33.426.928.920	33.846.657.845
	JUMLAH EKUITAS		33.426.928.920	33.846.657.845
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.465.095.886	33.888.150.820

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM SURABAYA I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	7.463.700.000	7.140.840.000
JUMLAH PENDAPATAN		7.463.700.000	7.140.840.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	12.347.088.569	12.533.982.774
Beban Persediaan	D.3	979.524.329	990.314.942
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.474.398.751	3.638.005.190
Beban Pemeliharaan	D.5	980.657.546	939.041.327
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.542.140.301	1.371.307.190
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.065.077.311	1.343.323.726
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	3.682	
JUMLAH BEBAN		20.388.890.489	20.815.975.149
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.925.190.489)	(13.675.135.149)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	6.873.000	(241.907.555)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		10.599.000	9.589.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		3.726.000	251.497.554
Surplus Penjualan Aset Nonlancar			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.000.212	(8.777.266)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.000.212	5.921.924
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		14.873.212	(250.684.821)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(12.910.317.277)	(13.925.819.970)
POS LUAR BIASA	D.12		

	Pendapatan PNB		-	-
	Beban Perjalanan Dinas		-	-
	Beban Persediaan		-	-
	SURPLUS/DEFISIT LO		(12.910.317.277)	(13.925.819.970)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KIPM SURABAYA I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	33.846.657.845	35.512.411.748
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.910.317.277)	(13.925.819.970)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	242.000
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	242.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12.490.588.352	12.259.824.067
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(419.728.925)	(1.665.753.903)
EKUITAS AKHIR	E.6	33.426.928.920	33.846.657.845

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai KIPM Surabaya I

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor 23, Semabung, Gedangan, Sidoarjo, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Selain itu, BKIPM Surabaya I juga memiliki tugas dan fungsi yakni melakukan pengawasan keamanan hayati ikan. Melalui peran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 92 /PERMEN - KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai KIPM Surabaya I mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Tugas : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
- b. Fungsi :
 - penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
 - pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri

- dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 - pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
 - pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
 - pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
 - pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
 - pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;

- pelaksanaan surveilan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Surabaya I, terdiri atas:

1. Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Surabaya I sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10. Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten Bondowoso 19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22. Kota Blitar 23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26. Kabupaten Jember.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya.”

MISI :

1. *Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.*
2. *Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.*

3. *Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.*

TUJUAN :

“Melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional”.

SASARAN STRATEGIS :

1. *Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;*
2. *Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;*
3. *Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;*
4. *Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;*
5. *Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.*

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Balai KIPM Surabaya I.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Balai KIPM Surabaya I menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Balai KIPM Surabaya I dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Balai KIPM Surabaya I. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai KIPM Surabaya I adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas

dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan,	25

Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Balai KIPM Surabaya I melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 sebanyak 12 kali dan terdapat perubahan total pagu anggaran DIPA dari semula Rp. 20.799.217.000 menjadi sebesar Rp. 19.951.217.000:

1. REVISI BLOKIR AA TAHAP I
2. REVISI HALAMAN III DIPA TRIWULAN I
3. REVISI HAL III DIPA TRIWULAN II
4. REVISI HAL III DIPA TRIWULAN II
5. REVISI PERUBAHAN PAGU ANGGARAN
6. REVISI HAL III DIPA TRIWULAN III
7. REVISI REALOKASI BELANJA PEGAWAI
8. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA
9. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA
10. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA
11. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA
12. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA

Adapun rincian DIPA Balai KIPM Surabaya I berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2023 SEMULA	ANGGARAN 2023 MENJADI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	7.438.121.000	7.438.121.000
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	7.438.121.000	7.438.121.000
Belanja		
Belanja Pegawai	12.596.331.000	12.429.331.000

Belanja Barang	7.338.496.000	6.868.496.000
Belanja Modal	864.390.000	653.390.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	20.799.217.000	19.951.217.000

Realisasi
Pendapatan
Rp 7.482.299.212

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.482.299.212 atau mencapai 100,59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 7.438.121.000. Pendapatan Balai KIPM Surabaya I terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	7.438.121.000	7.463.700.000	100,34
Pendapatan dari Penjualan Aset	-	10.599.000	100,00
Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	8.000.212	100,00
Jumlah	7.438.121.000	7.482.299.212	100,59

Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,52 persen dibandingkan TA 2022. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Balai KIPM Surabaya I antara lain dari pendapatan penjualan aset mengalami kenaikan sebesar 10,52 persen dan pengembalian belanja pegawai yang berasal dari tahun anggaran yang lalu mengalami kenaikan sebesar 35,09 persen.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	7.463.700.000	7.140.840.000	4,52
Pendapatan Penjualan Aset	10.599.000	9.589.999	10,52
Pendapatan TAYL	8.000.212	5.921.924	35,09
Jumlah	7.482.299.212	7.156.351.923	4,55

Pendapatan dari penjualan aset BMN tahun 2023 sesuai dengan dokumen sumber sebagai berikut:

1. NTPN F6FEF61QUQES6QMS tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp.2.500.000,- (Satu paket BMN berupa peralatan dan mesin inventaris kantor dengan kondisi rusak berat)
2. NTPN 642FB48VV5A3CQV8 tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp.5.000.000,- (Satu paket BMN berupa peralatan dan mesin inventaris kantor dengan kondisi rusak berat)
3. NTPN 36ED10N9VR6M1T9I tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp.300.000,- (Satu paket BMN berupa bongkaran bangunan)
4. NTPN A7ABA6U8ELMA7G9R tanggal 30 Oktober senilai Rp.2.799.000,- (Satu paket BMN berupa peralatan dan mesin inventaris kantor)

Pendapatan dari penerimaan belanja pegawai TAYL berasal dari pengembalian tunjangan pembulatan pegawai dan tunjangan fungsional sebagai berikut :

No	Tanggal	Dokumen Sumber	Nominal	Keterangan
1	10/01/2023	2316513030 00028	212	Pengembalian pembulatan pada SPM Kekurangan Gaji bulan Oktober s/d November 2022 untuk 9 Pegawai/33 Jiwa (SPM 00006)

2	18/07/2023	2316513030 02838	8.000.000	Pengembalian belanja pegawai pada SPM Kekurangan Gaji bulan Mei 2021 s/d Desember 2022 untuk 1 Pegawai/3 Jiwa (SPM)
		JUMLAH	8.000.212	

Realisasi Belanja
Rp. 19.864.529.209

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 19.864.529.209 atau 99,57% dari anggaran belanja sebesar Rp. 19.951.217.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2023*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12.429.331.000	12.349.051.083	99,35
Belanja Barang	6.868.496.000	6.862.402.126	99,91
Belanja Modal	653.390.000	653.076.000	99,95
Belanja Bantuan Sosial	-		#DIV/0!
Total Belanja Kotor	19.951.217.000	9.864.529.209	99,57
Pengembalian			
Jumlah	19.951.217.000	19.864.529.209	99,57

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,90% seperti tertera pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	12.349.051.083	12.531.426.574	(1,46)
Belanja Barang	6.862.402.126	6.712.267.586	2,24
Belanja Modal	653.076.000	60.450.000	980,36
Belanja Bantuan Sosial			-
Jumlah	19.864.529.209	19.304.144.160	2,90

Belanja Pegawai
Rp. 12.349.051.083

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 12.349.051.083 dan Rp. 12.531.426.574. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 1,46% dari TA 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pegawai pension dan mutasi.

*Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.349.051.083	12.531.426.574	(1,46)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	12.349.051.083	12.531.426.574	(1,46)
Pengembalian Belanja Pegawai		-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	12.349.051.083	12.531.426.574	(1,46)

Belanja Barang
Rp. 6.862.402.126

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 6.862.402.126 dan Rp.

6.712.267.586,-. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,24 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.977.593.485	1.899.458.943	4,11
Belanja Barang Non Operasional	267.097.939	479.070.270	(44,25)
Belanja Barang Persediaan	928.477.793	963.171.296	(3,60)
Belanja Jasa	1.235.932.136	1.258.482.983	(1,79)
Belanja Pemeliharaan	911.160.472	740.776.904	23,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.542.140.301	1.371.307.190	12,46
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	6.862.402.126	6.712.267.586	2,24
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	6.862.402.126	6.712.267.586	2,24

*Belanja Modal
Rp. 653.076.000*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 653.076.000 dan Rp. 60.450.000,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 980,36% dibandingkan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	653.076.000	60.450.000	980,36
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	653.076.000	60.450.000	980,36
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	653.076.000	60.450.000	980,36

ANALISIS HORIZONTAL PERALATAN DAN MESIN

Uraian	Nilai
Realisasi Belanja Modal Alsin Tahun 2023	653.076.000
Penambahan (Penurunan)	411.193.840
Saldo Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023	13.920.548.236
Saldo Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 (Saldo Awal 2023)	13.509.354.396
Selisih	241.882.160
Klarifikasi Selisih	Nilai
Koreksi Saldo Awal	-
Transfer Masuk	
Reklasifikasi Masuk	-
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-
Transfer Keluar	

Reklasifikasi Keluar	-
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	241.882.160
Pengembangan Nilai Aset	-
Jumlah Klarifikasi Selisih	241.882.160

RUMUS	
REALISASI BELANJA MODAL peralatan dan mesin	653.076.000
PENAMBAHAN (PENURUNAN)	411.193.840
- ASET peralatan dan mesin 2023	13.920.548.236
- ASET peralatan dan mesin 2022	13.509.354.396
Selisih	241.882.160
PENJELASAN : selisih merupakan Penghentiaan Aset Dari Penggunaan dengan rincian : ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR Rp (1,145,000), ALAT RUMAH TANGGA Rp (16,451,560), PERALATAN PEMANCAR Rp (5,200,000), UNIT ALAT LABORATORIUM Rp (212,585,600), ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Rp (6,500,000)	

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pada periode ini belum terdapat belanja Modal Tanah pada Balai KIPM Surabaya I.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31

Desember 2023 adalah sebesar Rp. 653.076.000 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp. 60.450.000. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 980,36% dibandingkan TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	653.076.000	60.450.000	980,36
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	653.076.000	60.450.000	980,36
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	653.076.000	60.450.000	980,36

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pada periode ini belum terdapat belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Balai KIPM Surabaya I.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung Balai KIPM Sby I	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun ini maupun tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.6 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0,-.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.7 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Lainnya pada tahun 2023 maupun tahun sebelumnya.

Belanja Bantuan Sosial Rp. 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial pada Balai KIPM Surabaya I.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	#DIV/0!
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Uang Tunai di Brankas	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Kwitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Rincian di atas sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan nomor bukti terakhir : 00335/SSP/427542/2023 pada tanggal 31 Desember 2023.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dengan adanya sistem pembayaran secara elektronik melalui mesin EDC, pengguna jasa karantina langsung membayar tagihan/billing tersebut melalui mesin EDC.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Uang Tunai	-	-
Bank MANDIRI	-	-
Jumlah	-	-

Rincian kas di bendahara penerimaan sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi tanggal 2 Januari 2024 dengan posisi saldo Buku Kas Umum Rp. 0,- dan nomor bukti terakhir : - terlampir pada laporan keuangan Balai KIPM Surabaya I tahun anggaran 2023.

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp. 0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	TA 2023	TA 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan

C.4 Piutang Bukan Pajak

Pajak
Rp 736.314

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 736.314 dan Rp. 0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	736.314	-

Piutang PNBP
Rp 0

C.4.1. Piutang PNBP

Realisasi piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Piutang PNBP	-	-

Piutang Lainnya
Rp 736.314

C.4.2. Piutang Lainnya

Realisasi piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 736.314 dan Rp 0.

Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Piutang Lainnya	736.314	-
Jumlah	736.314	-

Piutang lainnya berupa pengembalian uang makan PNS bulan Desember 2023 senilai Rp.74.000 sebanyak 2 pegawai; dan pengembalian Tunjangan Kinerja bulan Desember 2023 senilai Rp. 662.314 sebanyak 36 pegawai.

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp. 0

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama	TA 2023	TA 2022
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp. 0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA
per 31 Desember 2023 dan 2022*

No	Nama	TA 2023	TA 2022
1		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp. (3.682)*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. (3.682) dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	736.314	0,50%	3.682
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	736.314		3.682
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-

Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	736.314		3.682

Belanja Dibayar
di Muka Rp.
22.875.000

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 22.875.000,- dan Rp. 18.750.000,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2023 dan 2022*

Jenis	TA 2023	TA 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung	22.875.000	18.750.000
Jumlah	22.875.000	18.750.000

Rincian Belanja dibayar di muka terdiri atas :

1. Sewa Rumah untuk Kantor Pelayanan Wilker KI Banyuwangi dengan Ibu Risky Indriani di Kabupaten Banyuwangi selama 1 Tahun mulai 1 Juni 2023 - 31 Mei 2024 sebesar Rp 45.000.000. Perhitungan Sewa selama 1 Tahun sebagai berikut :

a. $Rp\ 45.000.000 / 12\ bulan = Rp3.750.000 / bulan$

b. Pencatatan Belanja Barang dibayar dimuka sisa 5 bulan (01 Januari 2024 - 31 Mei 2024) sebesar Rp 3.750.000 x 5 bulan = Rp 18.750.000

2. Sewa Rumah untuk Kantor Pelayanan Wilker KI

Malang dengan Chendra Susilowati Jusuf di Kabupaten Malang selama 1 Tahun mulai 20 Januari 2023 - 20 Januari 2024 sebesar Rp 49.500.000. Perhitungan Sewa selama 1 Tahun sebagai berikut :

- a. $Rp\ 49.500.000 / 12\ bulan = Rp4.125.000 / bulan$
- b. Pencatatan Belanja Barang dibayar dimuka sisa 1 bulan (01 Januari 2024 - 20 Januari 2024) sebesar $Rp\ 4.125.000 \times 1\ bulan = Rp\ 4.125.000$

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp. 0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis	TA 2023	TA 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.250.852.391*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 250.852.391 dan Rp. 263.037.646.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis	TA 2023	TA 2022
Barang Konsumsi	167.345.126	96.717.617
Barang untuk Pemeliharaan		52.800
Suku Cadang	14.257.910	83.702.184
Pita Cukai, Materai dan Leges		
Persediaan lainnya		
Persediaan bahan baku	69.249.355	82.565.045
Jumlah	250.852.391	263.037.646

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : B.3/BKIPM.SBY.I/PL.450/I/2024 tanggal 2 Januari 2024.

Tagihan
TP/TGR
Rp. 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Debitur	TA 2023	TA 2022
1			
	Jumlah	-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Debitur	TA 2023	TA 2022
1		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per
31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp.
23.356.710.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 23.356.710.000 dan Rp 23.356.710.000. Tidak terdapat kenaikan nilai aset tanah pada tahun ini. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	23.356.710.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2023	23.356.710.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah
per 31 Desember 2023

No	KIB	Luas	Nilai	Nilai
1	2.01.01.04.008.1	996 M2	11.724.414.000	Jl Raya Juanda No 23
2	2.01.01.04.008.2	782 M2	2.193.238.000	Banyuwangi
3	2.01.01.04.008.3	235 M2	744.363.000	Kwangsan, Sidoarjo
4	2.01.01.04.008.4	500 M2	5.885.750.000	Jl Raya Juanda No 23
5	2.01.01.04.008.5	270 M2	2.808.945.000	Jl Raya Juanda No 23
Jumlah			23.356.710.000	-

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

*Peralatan dan
Mesin
Rp. 13.920.548.
236*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 13.920.548.236 dan Rp. 13.509.354.396. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin

Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I

Periode Tahunan Tahun Periode 2023, Per 31 Desember 2023
(Unaudited)

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (Audited)		1.047	13.509.354.396	6	4.783.350
Mutasi Tambah		37	653.076.000	-	-
100	Penambahan Saldo Awal	-	-	-	-
101	Pembelian	37	653.076.000	-	-
102	Transfer Masuk	-	-	-	-
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
177	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	-	-	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-	-	-
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-	-	-
Mutasi Kurang		14	241.882.160	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	-	-	-
302	Transfer Keluar	-	-	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
308	Usulan Barang Hilang Ke Pengelola	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Penggunaan	14	241.882.160	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Unaudited)		1.070	13.920.548.236	6	4.783.350

Pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023, per 31 Desember 2023 terdapat transaksi pembelian peralatan dan mesin dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	Unit	Nilai	Uraian Barang
Lemari Penyimpan	1	28.985.000	Lemari Penyimpan Barang hand made (custom)
Camera Conference	1	11.840.000	Logitech / PTZ Pro2 Camera AP
A.C Split	4	36.910.000	AC Dinding Merk Panasonic Standart 2 PK
Papan Visual/Papan Nama	1	26.751.000	Hand Made
LCD Projector/Infocus	2	13.900.000	Merk Acer
Televisi	1	3.480.000	Panasonic / LED Full HD Smart TV 32 Insh Android
Refrigerator	2	54.600.000	Merk GEA/EXPO 800-PH
Gene Amp Pcr System	1	241.750.000	MerkThermo Fisher Scientific/Proflex 3x32 Well PCr System
Refrigerator/Freezer	2	35.800.000	Merk GEA /1050 L/AB 1200
P.C Unit	7	108.850.000	Acer / Veriton Z4 AIO - Core 13
Lap Top	3	43.350.000	Acer / Travelmate P214 Core 15
Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	29.160.000	Epson / Ecotank L3210
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	17.700.000	Canon / Documen Reader R40
Jumlah		653.076.000	

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
9.686.349.336*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 9.686.349.336 dan Rp. 9.686.349.336. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan

Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I

Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023, Per 31 Desember 2023
(Unaudited)

Kode Trn	Uraian	Intra		Ekstra	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (Audited)		11	9.686.349.336	1	6.000.000
Mutasi Tambah		-	-	-	-
101	Pembelian	-	-	-	-
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-	-	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-	-	-
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	-	-	-	-
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	-	-	-	-
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	-	-	-	-
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	-	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-	-	-
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-	-	-
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-	-	-	-
225	Koreksi Kesalah Input IP (+)	-	-	-	-
245	Koreksi Barang Berlebih Penilaian Kembali	-	-	-	-
238	Koreksi Hasil Revaluasi Reklasifikasi Keluar	-	-	-	-
333	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan Reval	-	-	-	-
334	Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	-	-	-	-
335	Koreksi Reklas Keluar Akibat Penilaian Kembali	-	-	-	-
Mutasi Kurang		-	-	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-	-	-	-
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	-	-	-	-
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-	-	-	-
229	Koreksi Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	-	-	-	-
240	Koreksi Reklas Masuk Akibat Penilaian 225	-	-	-	-
225	Koreksi Kesalah Input IP (+)	-	-	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-	-	-
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	-	-	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Unaudited)		11	9.686.349.336	1	6.000.000

Pada periode tahun anggaran 2023 tidak terdapat penambahan aset gedung dan bangunan. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.
224.579.100

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 224.579.100 dan Rp. 224.579.100 . Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Mutasi Jalan dan Jembatan

Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I

Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023, Per 31 Desember 2023
(Unaudited)

Kode Trn	Uraian	Intra	
		Luas	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (Audited)		637	208.196.000
Mutasi Tambah		-	-
101	Pembelian	-	-
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-	-
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	-	-
225	Koreksi Kesalahan Inpt IP	-	-
Mutasi Kurang		-	-
225	Koreksi Kesalahan Inpt IP	-	-
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-	-
229	Koreksi Revaluasi BMN tidak Ditemukan	-	-
301	Penghapusan	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Unaudited)		637	208.196.000

Ringkasan Mutasi Irigasi
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I
Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023, Per 31 Desember 2023
(Unaudited)

Kode Trn	Uraian	Intra	
		Luas	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (Audited)		1	7.128.000
Mutasi Tambah		-	-
107	Reklasifikasi Masuk	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	-
225	Koreksi Kesalahan Inpu IP	-	-
Mutasi Kurang		-	-
225	Koreksi Kesalahan Inpu IP	-	-
301	Penghapusan	-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-
305	Koreksi Pencatatan	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Unaudited)		1	7.128.000

Ringkasan Mutasi Jaringan
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I
Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023, Per 31 Desember 2023
(Unaudited)

Kode Trn	Uraian	Intra	
		Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (Audited)		2	9.255.100
Mutasi Tambah		-	-
101	Pembelian	-	-
202	Pengembangan Nilai Aset	-	-
208	Pengembangan Melalui KDP	-	-
Mutasi Kurang		-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Unaudited)		2	9.255.100

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp. 83.490.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 83.490.000 dan Rp. 0. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang pada periode ini, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per Jenis Transaksi Balai KIPM Surabaya I
Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023, Per 31 Desember 2023
(Unaudited)

Kode Trn	Uraian	Intra	
		Unit	Nilai
Saldo Awal Per 01 Januari 2023 (Audited)		-	-
Mutasi Tambah		12	83.490.000
101	Pembelian	-	-
107	Reklasifikasi Masuk	12	83.490.000
Mutasi Kurang		-	-
304	Reklasifikasi Keluar	-	-
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Unaudited)		12	83.490.000

Rincian Aset Tetap Lainnya berupa transfer masuk peralatan musik dari Balai KIPM Surabaya II sejumlah 12 unit dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Unit	Nilai	Uraian Barang
1	Alat Musik Modern/Band	1	5.500.000	Gillmore
2	Alat Musik Modern/Band	1	15.730.000	Mapex Tornado
3	Alat Musik Modern/Band	1	8.800.000	Cort
4	Alat Musik Modern/Band	1	1.485.000	Behringer
5	Alat Musik Modern/Band	1	5.500.000	Dynie
6	Alat Musik Modern/Band	1	2.750.000	Lokal
7	Alat Musik Modern/Band	1	5.885.000	Gillmore
8	Alat Musik Modern/Band	1	5.500.000	Dynie
9	Alat Musik Modern/Band	1	1.485.000	Behringer
10	Alat Musik Modern/Band	1	1.485.000	Behringer
11	Alat Musik Modern/Band	1	23.870.000	Yamaha
12	Alat Musik Modern/Band	1	5.500.000	Dynie
Jumlah		12	83.490.000	

Analisis vertikal Aset Tetap Lainnya disajikan dalam tabel berikut:

RUMUS	
REALISASI BELANJA MODAL Aset Tetap Lainnya	: 0
PENAMBAHAN (PENURUNAN)	: 83.490.000
- ASET Aset Tetap Lainnya 2023	: 83.490.000
- ASET Aset Tetap Lainnya 2022	: 0
Selisih	: -83.490.000
PENJELASAN : selisih merupakan transfer masuk peralatan musik dari Balai KIPM Surabaya II sejumlah 12 unit sebesar Rp.83.490.000	

ANALISIS HORIZONTAL ASET TETAP LAINNYA

Uraian	Nilai
Realisasi Belanja Modal ATL Tahun 2023	-
Penambahan (Penurunan)	83.490.000
Saldo Aset ATL Per 31 Desember 2023	83.490.000
Saldo Aset ATL Per 31 Des 2022 (Saldo Awal 2023)	-

Selisih	(83.490.000)
Klarifikasi Selisih	Nilai
Transfer Masuk	83.490.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Transfer Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Jumlah Klarifikasi Selisih	83.490.000

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp 0. Pada tahun ini, Balai KIPM Surabaya I tidak melakukan pembangunan gedung.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
(14.081.040.809)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp (14.081.040.809) dan Rp (13.170.629.658). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp. 0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 0 dan Rp 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
Jumlah	0

*Aset Lain-Lain
Rp. 0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai

berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp 0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp. 0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 38.166.966

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 38.166.966 dan Rp 41.492.975. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai KIPM Surabaya I per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga	31.667.648	Tagihan Listrik Bulan Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	4.963.318	Tagihan Telepon Bulan Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	206.000	Tagihan PDAM Bulan Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	1.330.000	Kekurangan Uang Makan PNS bulan Desember 2023 sesuai SPM Nomor : 00005T/427542/2024 tanggal 15-01-2024
Total	38.166.966	

Utang yang
Belum
Ditagihkan
Rp 0

C.26 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023

dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

Uraian	Jumlah
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2023 dan 2022*

Uraian	TA 2023	TA 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp.
33.426.928.920*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 33.426.928.920 dan Rp. 33.846.657.845. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp 7.463.700.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 7.463.700.000 dan Rp. 7.140.840.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	7.463.700.000	7.140.840.000	4,52
Pendapatan Penjualan Aset	10.599.000	9.589.999	10,52
Pendapatan TAYL	8.000.212	5.921.924	35,09
Jumlah	7.482.299.212	7.156.351.923	4,55

Pendapatan jasa berasal dari pendapatan sensor jasa karantina yang diperoleh oleh Balai KIPM Surabaya I selama periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

Pendapatan PNB Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca TA 2023 secara horizontal sebagai berikut :

Analisis horizontal antara LO LRA dan Neraca

Pendapatan PNB (LO) harus sama dengan Pendapatan PNB (LRA) dikurangi Piutang PNB Awal Tahun ditambah Piutang PNB Akhir Tahun	Pendapatan PNB (LO) = Pendapatan PNB (LRA) - Piutang PNB Awal Tahun + Piutang PNB Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN PNB (LO)	: 7.463.700.000
PENDAPATAN PNB (LRA)	: 7.482.299.212
PIUTANG PNB AKHIR TAHUN (NERACA)	: 0
PIUTANG PNB AWAL TAHUN (NERACA)	: 0
Selisih	: -18.599.212

PENJELASAN : Selisih terdapat pada pendapatan selain pembentuk LO (Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp. 300,000; Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 7.500.000 dan Rp.2.799.000) ditambah dengan informasi akrual TAYL (pengembalian belanja pegawai TAYL sebesar Rp. 8.000.212)

Pada tabel diatas terdapat selisih pendapatan PNBPN di Laporan Operasional dengan pendapatan PNBPN di Laporan Realisasi Anggaran periode 31 Desember 2023 sebesar Rp. (18.599.212). Selisih tersebut dijelaskan dalam analisis secara horizontal pendapatan PNBPN Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

ANALISIS HORIZONTAL LO, LRA, NERACA
Pada Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPN LO :			
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-
2	425332	Pendapatan Jasa Karantina Ikan	7.463.700.000
3	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-
4	425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-
5	115211	Piutang PNBPN	-
6	115212	Piutang Lainnya	-
			7.463.700.000
Pendapatan PNBPN LRA :			7.482.299.212
Selisih :			(18.599.212)
Klarifikasi Selisih:			
1	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	300.000
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10.299.000

3	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-
4	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-
5	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	8.000.212
6	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-
7	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-
Akrual PNBPN TAYL / Jurnal Balik			-
Akrual PNBPN 31 Desember 2022			-
1	425332		-
2	425332		-
3	Piutang PNBPN		-
			18.599.212

Beban Pegawai
Rp 12.347.088.569

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 12.347.088.569 dan Rp 12.533.982.774. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	4.598.915.229	4.701.309.921	(2,18)

Beban Tunjangan-tunjangan	7.046.123.340	7.072.212.853	(0,37)
Beban Honorarium (uang makan)	702.050.000	760.460.000	(7,68)
Beban Lembur			#DIV/0!
Jumlah beban pegawai	12.347.088.569	12.533.982.774	(1,49)

Beban Persediaan
Rp 979.524.329

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 979.524.329 dan Rp. 990.314.942. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	537.273.198	509.182.232	5,52
Beban Persediaan Bahan Baku	442.251.131	481.132.710	(8,08)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		-	-
Beban Persediaan suku cadang		-	-
Beban persediaan lainnya	-	0	-
Jumlah Beban Persediaan	979.524.329	990.314.942	(1,09)

Beban persediaan Balai KIPM Surabaya I dalam Laporan Operasional, LRA dan Neraca TA 2023 secara horizontal sebagai berikut :

Analisis horizontal antara LO LRA dan Neraca

Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun	Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun. Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau <i>weighted average</i>
RUMUS	
BEBAN PERSEDIAAN (LO) :	1.049.021.403
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA) :	928.477.793
PERSEDIAAN AWAL TAHUN :	263.037.646
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN :	250.852.391
Selisih :	108.358.355
PENJELASAN : Selisih dikarenakan adanya Transfer Masuk HC Rp.108.369.850, dan transfer keluar Rp. (11.495)	

Uraian	Nilai
Beban Persediaan	979.524.329
Beban Persediaan Untuk Pemeliharaan	52.800
Beban Suku Cadang	69.444.274
Total Realisasi 5218 +523	928.477.793
Saldo Awal Neraca Persediaan 2023 (Per 31 Des 2022)	263.037.646
Saldo Akhir Neraca Persediaan per 31 Desember 2023	250.852.391
Selisih	108.358.355

Klarifikasi Selisih	Nilai
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Transfer Masuk HC	108.369.850
Transfer keluar Pita, Cukai, Materai dan Leges	(11.495)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-
Pengembalian Belanja 5218	-
Klarifikasi Selisih Beban Persediaan	108.358.355

Beban Barang
dan Jasa Rp
3.474.398.751

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.474.398.751 dan Rp 3.638.005.190. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Keperluan Perkantoran	1.547.019.057	1.425.737.290	8,51
Daya Tahan Tubuh	64.773.828	80.852.008	-19,89
Surat Dinas Pos	22.181.100	20.535.910	8,01
Honor Operasional Satker	205.680.000	183.278.000	12,22
Barang Operasional Lainnya	137.939.500	74.541.500	85,05
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19		114.514.235	-100,00
Bahan	248.097.939	421.757.040	-41,18
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		5.424.000	-100,00
Barang Non Operasional Lainnya	19.000.000	57.313.230	-66,85
Listrik	407.771.442	376.069.728	8,43
Telepon	65.647.185	84.704.062	-22,50
Air	4.434.700	14.716.400	-69,87
Langganan Daya dan Jasa Lainnya		108.575.187	-100,00
Sewa	175.747.000	156.867.500	14,66
Jasa Profesi	68.800.000	38.350.000	79,40
Jasa Lainnya	507.307.000	474.769.100	6,85
Jumlah	3.474.398.751	3.638.005.190	-4,50

Beban
Pemeliharaan
Rp980.657.546

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp. 980.657.546 dan Rp. 939.041.327. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	355.009.368	246.564.026	43,98
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	556.151.104	494.212.878	12,53
Beban persediaan untuk pemeliharaan	52.800	11.963.070	-99,56
Beban persediaan suku cadang	69.444.274	186.301.353	-62,72
Beban Pemeliharaan jaringan	0	0	-
Jumlah	980.657.546	939.041.327	4,43

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.542.140.301

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.542.140.301 dan Rp 1.371.307.190. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Beban Perjalanan Biasa	938.198.116	1.230.565.578	-23,76
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.214.000	52.058.800	36,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	532.728.185	88.682.812	500,71
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah	1.542.140.301	1.371.307.190	12,46

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Balai KIPM Surabaya I tidak ada beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp 1.065.077.311

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.065.077.311 dan Rp 1.343.323.726. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	821.594.616	1.099.841.031
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	224.926.711	224.926.711

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18.079.500	18.079.500	-
Beban Penyusutan Irigasi	209.647	209.647	-
Beban Penyusutan Jaringan	266.837	266.837	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak di gunakan dalam operasional	-	-	-
Jumlah Penyusutan	1.065.077.311	1.343.323.726	(20,71)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.065.077.311	1.343.323.726	(20,71)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.3.682*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.682 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	3.682	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	3.682	0	#DIV/0!

Surplus/Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp. 14.873.212

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Deposit pelepasan aset non lancar	6.873.000	(241.907.555)	
Pendapatan pelepasan aset non lancar	10.599.000	9.589.999	-
Beban pelepasan aset non lancar	3.726.000	251.497.554	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.000.212	(8.777.266)	
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	5.921.924	- 100
Beban Kegiatan	0		#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	14.873.212	(250.684.821)	-105,93

Pos Luar Biasa
Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Persamaan
Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO ditambah (dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas	Ekuitas akhir = ekuitas awal (+/-) surplus/defisit LO (+/-) koreksi berdampak ke ekuitas
RUMUS	
Ekuitas Akhir	: 33.426.928.920
Ekuitas Awal	: 33.846.657.845
Surplus/defisit LO	: (12.910.317.277)
Koreksi	: 0
Selisih	: 12.490.588.352
PENJELASAN	
Selisih merupakan TAE (Transaksi Antar Entitas) sebesar Rp. 12.490.588.352,00; dengan rincian Realisasi belanja Rp, 19.864.529.209, realisasi pendapatan Rp (7.482.299.212), transfer masuk Rp. 108.369.850 dan transfer keluar Rp (11.495)	

*Ekuitas Awal Rp
33.846.657.845*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 33.846.657.845 dan Rp 35.512.411.748.

*Defisit LO
Rp
(12.910.317.277)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp

(12.910.317.277) dan Rp (13.925.819.970). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp 0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp
12.490.588.352*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 12.490.588.352 dan Rp. 12.259.824.067.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.864.529.209
Diterima dari Entitas Lain	(7.482.299.212)
Transfer Masuk	108.369.850
Transfer Keluar	(11.495)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	12.490.588.352

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp (7.482.299.212) sedangkan DKEL sebesar Rp 19.864.529.209.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk persediaan barang konsumsi berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dari Sekretariat BKIPM pada Periode Tahun Anggaran 2023 sejumlah 18.750 eksemplar dengan berbagai jenis dengan nilai total keseluruhan Rp 108.369.850.

KODE	U R A I A N	KUANTITAS	RUPIAH
117111	Barang Konsumsi		
1010301014	Barang Cetakan	18.750	108.369.850
000010	SERTIFIKAT KI-D12 (2020)	500	1.149.500
000012	SERTIFIKAT MUTU A (2020)	250	1.663.750
000013	SERTIFIKAT MUTU B (2020)	1.000	13.305.000
000015	SERTIFIKAT MUTU D (2020)	250	1.512.500
000016	SERTIFIKAT MUTU E (2020)	2.350	15.632.500
000017	SERTIFIKAT MUTU F (2020)	5.000	33.265.000
000018	SERTIFIKAT MUTU G (2020)	150	998.250
000023	SERTIFIKAT MUTU XF (2020)	400	3.322.850
000030	SERTIFIKAT KOREA BARU (2020)	250	1.387.500
000031	SERTIFIKAT KANADA BARU (2020)	100	880.000
000032	SERTIFIKAT CHINA BARU (2020)	250	1.360.000
000033	SERTIFIKAT KID1 (2022)	8.250	33.893.000
	Jumlah	18.750	108.369.850
	Total Jumlah	18.750	108.369.850

Sedangkan transfer keluar persediaan senilai Rp11.495,00 pada Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023, per 31 Desember 2023 (*Unaudited*). Transfer keluar ke Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan B.2911/BKIPM.SURABAYA.1/PL.450/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dengan jenis Sertifikat Pelepasan (KI-D12) sejumlah 5 eksemplar Rincian transfer keluar dan transfer masuk sesuai

BAST yang diterima dan/atau dikirim Balai KIPM Surabaya I per 31 Desember 2023 tersaji dalam Laporan Keuangan ini.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	Rp -
2	PT Semua Bahagia	Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir
Rp
33.426.928.920

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar Rp. 33.426.928.920 dan Rp. 33.846.657.845.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

1. Selama periode berjalan, Kantor Balai KIPM Surabaya I melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 sebanyak 12 kali dan terdapat perubahan total pagu anggaran DIPA dari semula Rp. 20.799.217.000 menjadi sebesar Rp. 19.951.217.000. Berikut revisi DIPA yang dilakukan Balai KIPM Surabaya I yaitu :
 - a. REVISI BLOKIR AA TAHAP I tanggal 26 Desember 2022. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - b. REVISI HALAMAN III DIPA TW-1 tanggal 16 Februari 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - c. REVISI HAL III DIPA TW-2 tanggal 12 April 2023.

- Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
- d. REVISI HAL III DIPA TW-2 tanggal 14 April 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - e. REVISI PERUBAHAN PAGU ANGGARAN tanggal 2 Juli 2023. Hal ini mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - f. REVISI HAL III DIPA TRIWULAN III tanggal 14 Juli 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - g. REVISI REALOKASI BELANJA PEGAWAI tanggal 19 Oktober 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - h. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA tanggal 25 Oktober 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - i. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA tanggal 9 November 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - j. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA tanggal 5 Desember 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
 - k. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA tanggal 8 Desember 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).

1. REVISI PEMUKTAHIRAN KPA tanggal 21 Desember 2023. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran semula (revisi terlampir).
2. Kerugian Pelepasan Aset (596111) senilai Rp 3.726.000 adalah masa manfaat aset yang dihentikan karena penghapusan (surat permohonan usulan penghapusan BMN terlampir).
3. Kegiatan/Komponen Program Prioritas Nasional TA 2023 pada Satker Balai KIPM Surabaya I :

KOMPONEN/ KEGIATAN	VOLUME/ SATUAN	ANGGARAN (Dalam Rupiah)	REALISASI (Dalam Rupiah)	Prosentase
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	410 Sertifikat	145.000.000	144.995.586	99,997
Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	5 Lokasi	92.000.000	91.841.151	99,827
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	25 UPI	25.500.000	25.377.449	99,519
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	147 UPI	300.000.000	299.929.490	99,976
Sarana Pengujian Mutu	1 Unit	573.590.000	573.281.000	99,946
Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	45 UPI	141.500.000	141.491.034	99,994
Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	38.200 Sertifikat	392.755.000	392.218.753	99,863

Perkara pelanggaran peraturan perkarantina ikan yang di selesaikan	4 Perkara	25.802.000	25.409.129	98,477
Sarana pengawasan karantina	2 Unit	79.800.000	79.795.000	99,994
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1 Rekomendasi Kebijakan	107.000.000	106.907.774	99,914
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	1 Lembaga	76.000.000	75.987.190	99,983
Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	3 Laporan	35.450.000	35.360.700	99,748
Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu	600 Orang	540.000.000	539.999.763	100,000

LAMPIRAN